



RENSTRA

Rencana Strategis

BPKPAD
Tahun 2024-2026

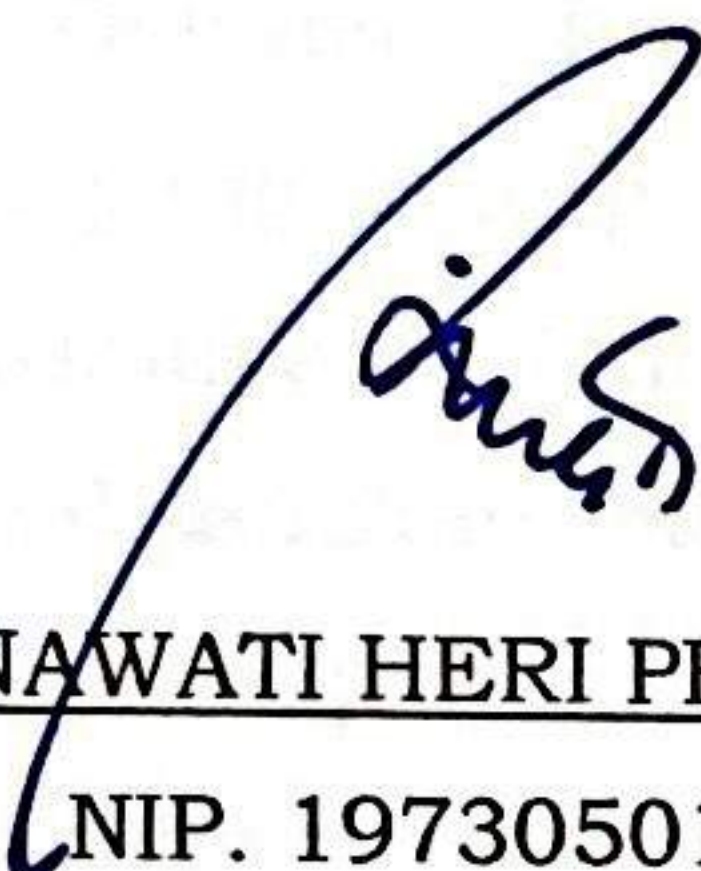



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 - 2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator
Pada Tanggal: 25 JANUARI 2023

Koordinator IV Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Petugas Verifikator


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004


EKO BUDI MULYANTO, S.E, M.M
NIP. 196811171990031002

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan transisi. Dokumen Renstra ini berisi Gambaran Kinerja Pelayanan dan Isu-isu Strategis yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026. Tujuan serta sasaran strategis akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan tujuan Kabupaten Temanggung pada masa transisi Kepala Daerah tahun 2024 - 2026.

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam berbagai bentuk dan banyak membantu dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Dokumen penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaik-baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan kritik serta saran untuk memperbaikinya.

Akhirnya kami berharap penyusunan dokumen Renstra ini dapat memenuhi harapan semua pihak dan membantu pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengalirkan keberkahan bagi kita semua.

Temanggung, 25 Januari 2023
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TRI WINARNO, SE., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKPAD	9
2.2 SUMBER DAYA BPKPAD	12
2.3 KINERJA PELAYANAN BPKPAD	16
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN BPKPAD.....	24
3.2 ISU STRATEGIS	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Bpkpad Tahun 2024-2026	26
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	27
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD	42
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD.....	44
BAB VIII PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPKPAD Kabupaten Temanggung	14
Tabel 2. 2	Jumlah <i>Supporting Staf</i> di BPKPAD Kabupaten Temanggung	15
Tabel 2. 3	Sarana dan Prasarana Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2022	16
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BPKPAD Kab Temanggung Tahun anggaran 2021 - 2023	18
Tabel 2. 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPKPAD	21
Tabel 3. I	Masalah Pokok di BPKPAD Kab Temanggung	24
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPKPAD tahun 2024-2026	27
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	30
Tabel 6. 1	Tabel Program dan Kegiatan BPKPAD	31
Tabel 6. 2	Indikator Kinerja BPKPAD dan Pendanaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	34
Tabel 7. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BPKPAD Kab Temanggung 2023-2026	43
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD BPKPAD Kab Temanggung 2024-2026	43
Tabel 7. 3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1. 2	Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 2. 1	Bagan Organisasi BPKPAD Kabupaten Temanggung	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

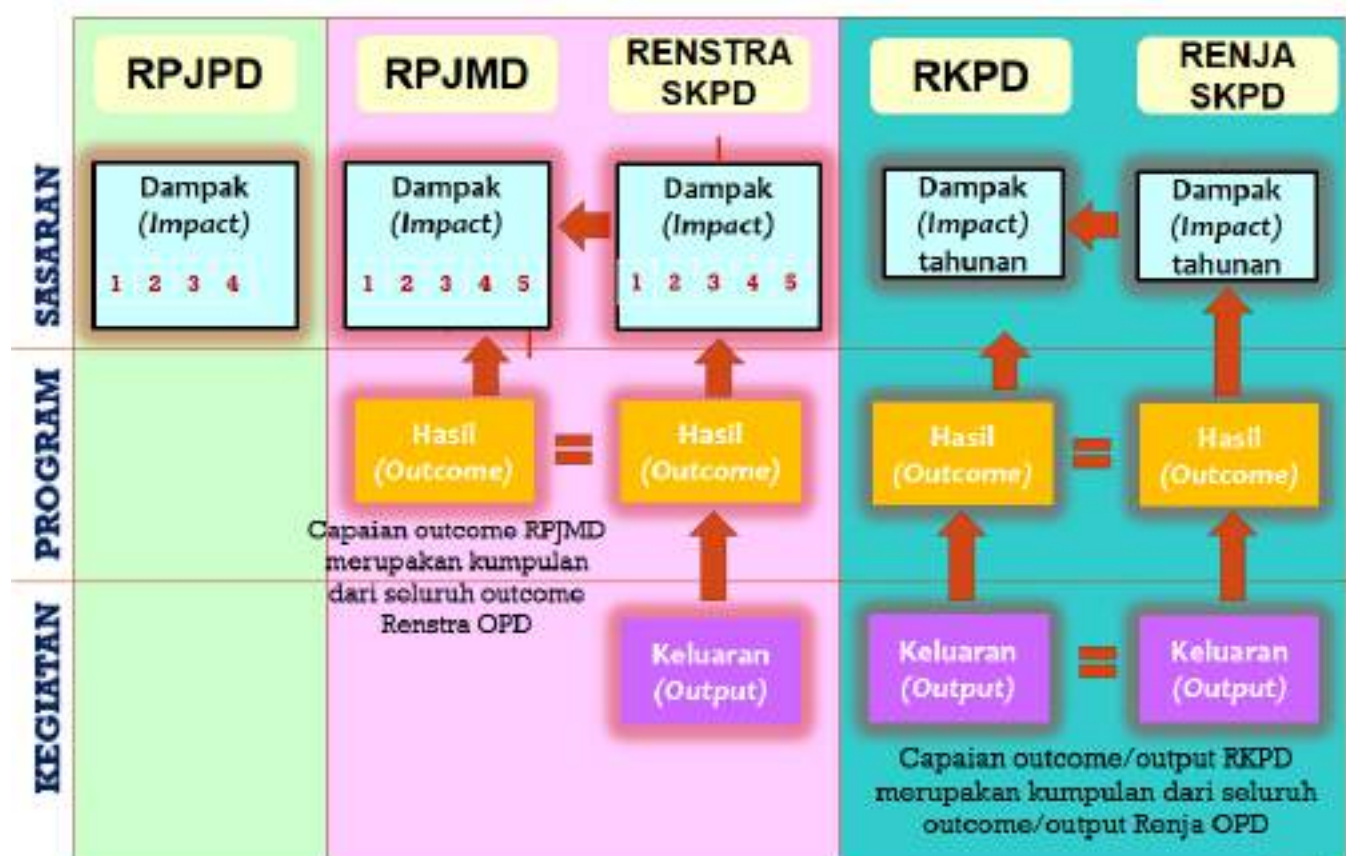
Proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1. 2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Cov19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Pedoman untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilu Serentak Tahun 2024.
3. Menyelaraskan program kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
4. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan.
5. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di penyelenggaraan Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
6. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah untuk mewujudkan tujuan dan

- sasaran daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
 4. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang gambaran umum tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan Kelompok Sasaran Layanan (BPKPAD kelompok sasaran layanannya adalah PD dan masyarakat)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

Memuat tentang Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II) dan Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dan *Cascading* kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhiran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang pernyataan penutup dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat daerah

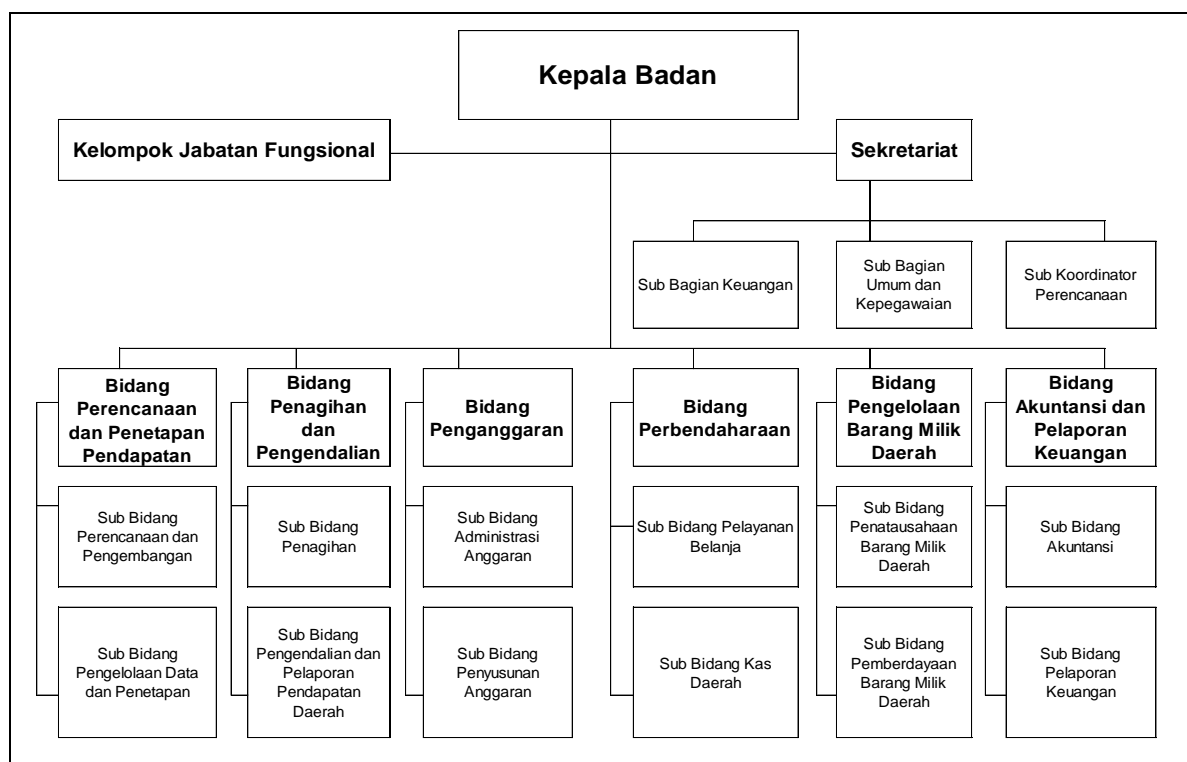
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Invenstasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung



Sumber data: Sekretariat BPKPAD 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

2.1.2.2 Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

2.1.2.3 Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan.

2.1.2.4 Bidang Penagihan dan Pengendalian Bidang Penagihan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah.

2.1.2.5 Bidang Penganggaran

mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran.

2.1.2.6 Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan.

2.1.2.7 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

2.1.2.8 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah.

2.1.2.9 Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional

Mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

2.2.1 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- e. Bidang Penganggaran, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

didukung 68 (enam puluh delapan) ASN dengan kualifikasi sebagaimana pada tabel 2.1

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
BadanPengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2		3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:			
	Kualisasi Pendidikan			
	A.	SD	0	
	B.	SMP	1	
	C.	SMA	8	
	D.	Sarjana Muda (D-III)	27	
	E.	S-1 dan D-IV	20	
	F.	S-2	12	
	Jumlah		68	
2	Pangkat/Golongan			
	A.	Gol I	0	
	B.	Gol II	27	
	C.	Gol III	32	
	D.	Gol IV	9	
	Jumlah		68	
3	Jabatan			
	A.	Eselon II	1	
	B.	Eselon III	7	
	C.	Eselon IV	13	
	D.	Eselon V	0	
	E.	Jabatan Fungsional Khusus	9	
	F.	Jabatan Fungsional Umum	38	
	Jumlah		68	
4	Pendidikan Pelatihan Struktural			
	A.	PIM I		
	B.	PIM II		
	C.	PIM III	3	
	D.	PIM IV	3	
	Jumlah		6	

Dukungan *Supporting Staf* di BPKPAD sebanyak 28 (dua puluh delapan) personil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Jumlah *Supporting Staf* di BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH SS	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	1	
	B. SMP	4	
	C. SMA	8	
	D. Sarjana Muda (D-III)	5	
	E. S-1 dan D-IV	9	
	F. S-2	1	
	Jumlah	28	
2	Jabatan		
	A. Staf Pendukung	14	
	B. Tenaga Keamanan	6	
	C. Tenaga Kebersihan	8	
	Jumlah	28	

2.2.3 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset daerah tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan

Aset/ modal di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang digambarkan secara sederhana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3
Sarana dan Prasarana Fungsi Penunjang Lainnya (Pendukung Kepala Daerah)
Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Tanah	7.862	m ²	
2.	Gedung	3	Gedung	Baik
3.	Alat Angkutan	95	Unit	Baik
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	827	Unit	Baik

Sumber: Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kab. Temanggung (2022).

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

2.3.1 Sasaran/Target Renstra

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah serta aset daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Dan 14 indikator program sebagai berikut :

1. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan
2. Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
3. Persentase dokumen penganggaran tepat waktu
4. Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu
5. Persentase realisasi keuangan
6. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel
7. Opini BPK atas LKPD
8. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja
9. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
10. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak
11. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu
12. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
13. Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
14. Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2021-2023) dengan menggunakan berbagai indikator serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun anggaran
2021 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	15	15	15	18,67	16,69	-	100	100	-
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,3	79,4	79,5	69,52	62,74	-	na	79,01	-
	Indikator Program									
1	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100,00	100,00	100,00	99,77	99,73	-	99,77	99,72	-
2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	89,96	89,96	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	42,86	-	100,00	42,85	-
4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
5	Persentase realisasi keuangan	93,00	93,00	93,00	89,00	87,61	-	95,7	94,2	-

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2									
6	Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel	90,00	90,00	90,00	89,13	95,65	-	99,03	100,00	-
7	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	100	100,00	-
8	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	84,52	86,31	88,1	84,52	100,00	-	95,94	100,00	-
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,7	98,9	99,1	78,83	88,21	-	79,55	89,18	-
10	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,72	0,96	1,27	0,7	1,94	-	55,12	100,00	-
11	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100	100,00	-
12	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100	100,00	-
13	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90,00	90,00	95,00	103,54	96,35	-	100	100,00	-
14	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	-	100	100,00	-

Berdasarkan tabel di atas, *time series* mulai tahun 2021 berdasar renstra perubahan yang disusun karena adanya perubahan nomenklatur dan kodefikasi kegiatan menyesuaikan SIPD, sehingga dapat digambarkan bahwa rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi capaian pada tiap tahun selama kurun waktu 2 tahun dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya target kinerja dapat tercapai bahkan ada beberapa capaian target kinerja yang melebihi target atau yaitu sama dari tahun ke tahun hanya pada indikator Persentase dokumen penganggaran tepat waktu target turun dikarenakan perencanaan penganggaran dilaksanakan satu tahun sebelum tahun anggaran dan terjadi peralihan menggunakan aplikasi SIPD. Indikator Kinerja akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah selalu mendapat opini WTP dari BPK RI. Sejak tahun 2012 Kabupaten Temanggung 10 (sepuluh) kali menyandang predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kinerja Keuangan

Tabel 2. 5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Program pengelolaan keuangan daerah	2.327.399.750	1.933.557.560	1.579.149.700	1.807.411.836	1.242.781.379	77,66%	64,27%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	709.455.700	580.025.000	500.876.800	579.011.500	428.951.102	81,61%	73,95%
Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	100	100	99,77	99,73		
Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	89,96	89,96	100,00	100,00		
Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	100	100	100,00	42,86		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	478.055.600	502.875.600	467.180.400	384.185.776	347.958.616	80,36%	69,19%
Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	100	100	100,00	100,00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.139.888.450	850.656.960	611.092.500	844.214.560	465.871.661	74,06%	54,77%
Persentase realisasi keuangan	93	93	93	89,00	87,61		
Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel	90	90	90	89,13	95,65		
Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
Program Pengelolaan BMD	3.037.709.050	3.088.268.500	1.104.680.400	1.845.914.766	1.892.064.368	60,77%	61,27%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN	
	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.037.709.050	3.088.268.500	1.104.680.400	1.845.914.766	1.892.064.368	60,77%	61,27%
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	84,52	86,31	88,1	84,52	100,00		
Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,7	98,9	99,1	78,83	88,21		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	935.418.300	1.244.955.200	645.625.400	695.306.208	1.086.661.276	74,33%	87,29%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	935.418.300	1.244.955.200	645.625.400	695.306.208	1.086.661.276	74,33%	87,29%
Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,72	0,96	1,27	0,70	1,94		
Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	100	100	100,00	100,00		
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	100	100	100,00	100,00		
Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90	90	95	103,54	96,35		
Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	95	95	100,00	100,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.059.001.348	16.634.899.874	25.710.091.306	11.435.651.547	15.061.309.424	94,83%	90,54%
JUMLAH	18.359.528.448	22.901.681.134	29.039.546.806	15.784.284.357	19.282.816.447	85,97%	84,20%

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan dibanding tahun 2021. Penurunan anggaran langsung yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasar tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Keuangan Daerah rasio pertumbuhan terjadi penurunan 64,27 % karena adanya *refocusing* anggaran. Program Pengelolaan BMD rasio pertumbuhan naik 61,27 % karena pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja terutama meningkatnya inventarisasi asset jalan dan jaringan irigasi dan lainnya. Untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah rasio pertumbuhan meningkat menjadi 87,69 % seiring dengan kinerja pelayanan pajak yang semakin baik.

Sedangkan program penunjang urusan pemerintahan daerah rasio pertumbuhan menurun karena *refocusing* anggaran meskipun kinerja sudah baik

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) maka sasaran layanan BPKPAD adalah semua Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di 103 Perangkat Daerah.
- b. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, BPKPAD mengkoordinasikan laporan Keuangan 103 Unit kerja dan laporan penggunaan Aset/ Barang milik Daerah 577 satuan kerja.
- c. Sebagai Perangkat Daerah pemungut pajak maka warga /masyarakat sebagai Wajib Pajak merupakan sasaran layanan BPKPAD dengan mitra kerja Perangkat desa/ kelurahan, Kecamatan, 11 (sebelas) OPD pemungut retribusi dan Bank Jateng.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, maka peranan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sangat penting dalam pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mulai dari menetapkan target pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun demikian peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Adapun hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. I
 Masalah Pokok di BPKPAD Kab Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum Optimalnya Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.	Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat kepedulian dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah • Belum optimalnya pengelolaan potensi pajak daerah • Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM • Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam pengelolaan pajak daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
2		Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Akuntansi • Proses Integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal.
3		Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan dan penatausahaan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap OPD. Sehingga di setiap OPD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak secara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah. • Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelolaan BMD

3.2 ISU STRATEGIS

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, menghadapi beberapa isu-isu strategis.

Adapun isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial,
2. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja,
3. Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024-2026

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung yang ingin dicapai seperti yang tersaji pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu :

- a. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan sasaran :
 - Meningkatnya perekonomian daerah;
 - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
 - Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
 - Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Untuk merealisasikan pelaksanaan tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sejalan dengan salah satu tujuan RPD Kabupaten Temanggung TA 2024-2026 yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN”.

Adapun tujuan organisasi yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung adalah:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi.”

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi, Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPKPAD tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE –				
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.”	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	65,5	66	66,5		
			Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP		
			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	%	15,5	15,75	16		
			INDIKATOR PROGRAM						
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	91	93	95		
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100		
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100		
			Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan	%	100	100	100		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE –		
					2024	2025	2026
			pengeluaran kas Daerah				
			penyampaian LKPD yang tepat waktu	%	100	100	100
			penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	80	80	85
			Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	8	9	10
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100
			Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	95	95,5	96
			Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100
			Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran dimana strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan. Pencapaian program atau implementasinya sehingga strategi merupakan alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

Arah Kebijakan Pembangunan RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2024 : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Tahun 2025 : Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Tahun 2026 : Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan tujuan : **“Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.”** Yaitu : Meningkatkan kualitas SDM dan Pengelolaan Teknologi Informatika serta Optimalisasi potensi pajak daerah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah fungsi penunjang pemerintah bidang keuangan.

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>		<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arah Kebijakan</i>	<i>PROGRAM</i>
“Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.”	“Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”	1	Opini BPK atas LKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM dan Pengelolaan TI • Optimalisasi potensi pajak daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara optimal 2. Peningkatan & mengembangkan pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan 3. Peningkatan pengelolaan BMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		2	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah			
		1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD			
		2	persentase dokumen penganggaran tepat waktu			
		3	persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu			
		4	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah			
		5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu			
		6	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu			
		7	persentase pemanfaatan aset di satuan kerja			
		8	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah			
		9	persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu			
10	persentase realisasi penerimaan pajak daerah					
11	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tiga tahun kedepan, yaitu tahun 2024- 2026 mempunyai rencana 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 6. 1
Tabel Program dan Kegiatan BPKPAD

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan	1	Gaji dan tunjangan ASN
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	17	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				18	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				19	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	21	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	22	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				23	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
				9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		25	Pengelolaan Dana darurat dan mendesak		
		26	Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota		
		III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah
28	Penatausahaan Barang Milik Daerah				
29	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	30	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				31	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				32	Penagihan Pajak Daerah
				33	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tiga tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6. 2

Indikator Kinerja BPKPAD dan Pendanaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	(Juta)				
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
"Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi."	"Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel"	5.02	KEUANGAN		428.736.393.613		506.020.077.313		508.550.177.700		511.092.928.589		511.092.928.589				
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		25.710.091.306		25.834.793.306		25.963.967.273		26.093.787.109		26.093.787.109				
		5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.682.391.306		24.812.793.306		24.853.467.273		24.888.287.109		24.888.287.109				
		5.02.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, tunjangan dan insentif unt ASN	24.682.391.306	14 Bulan	24.812.793.306	14 Bulan	24.812.793.306	14 Bulan	24.888.287.109	14 Bulan	24.888.287.109	14 Bulan	24.888.287.109	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9.200.000		0		0		0		0		0		
		5.02.01.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya CCTV untuk kantor	9.200.000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		186.500.000		190.000.000		204.000.000		217.500.000		217.500.000		217.500.000		
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	37.500.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	13.500.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	17.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan	78.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				harian pegawai											
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	53.500.000	12 Bulan	57.500.000	12 Bulan	57.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		622.000.000		622.000.000		684.500.000		752.500.000		752.500.000		
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	230.000.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	253.000.000	12 Bulan	278.000.000	12 Bulan	278.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, cleaning dan adm , iuran sampah dan lembur	390.000.000	12 Bulan	390.000.000	12 Bulan	429.000.000	12 Bulan	472.000.000	12 Bulan	472.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210.000.000		210.000.000		222.000.000		235.500.000		235.500.000		
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	90.500.000	12 Bulan	97.000.000	12 Bulan	97.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	52.500.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung	terpeliharanya perlengkapan kantor dan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	26.500.000	12 Bulan	28.500.000	12 Bulan	28.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kantor dan Bangunan Lainnya	penggantian suku cadang komputer dan AC											
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	52.500.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		401.275.996.507		478.259.949.007		480.651.248.752		483.054.504.996		483.054.504.996		
		5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		500.876.800		554.350.000		644.250.000		707.500.000		707.500.000		
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA & PPAS APBD Kabupaten Temanggung	52.345.000	2 Dokumen	57.600.000	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	71.500.000	2 Dokumen	71.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Temanggung	37.805.000	2 Dokumen	41.750.000	2 Dokumen	75.750.000	2 Dokumen	83.500.000	2 Dokumen	83.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung & Perbup tentang Penjabaran APBD	210.726.800	2 Dokumen	235.000.000	2 Dokumen	258.500.000	2 Dokumen	285.000.000	2 Dokumen	285.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung & Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD	200.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	245.000.000	2 Dokumen	267.500.000	2 Dokumen	267.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.2.2.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		467.180.400		515.000.000		566.500.000		625.000.000		625.000.000		
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan RIncian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP & terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan sp2d	467.180.400	103 Unit	515.000.000	103 Unit	566.500.000	103 Unit	625.000.000	103 Unit	625.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				dengan instansi terkait											
		5.2.2.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		611.092.500		675.500.000		730.000.000		815.500.000		815.500.000		
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung	210.616.500	2 Buku	235.000.000	2 Buku	245.000.000	2 Buku	280.500.000	2 Buku	280.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	400.476.000	46 Perangkat Daerah	440.500.000	46 Perangkat Daerah	485.000.000	46 Perangkat Daerah	535.000.000	46 Perangkat Daerah	535.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.03..	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.104.680.400		1.215.148.000		1.221.223.740		1.227.329.859		1.227.329.859		
		5.2.3.2.03.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.104.680.400		1.215.148.000		1.221.223.740		1.227.329.859		1.227.329.859		
		5.02.03.2.03.1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Harga Satuan	25.500.000	12 Bulan	25.500.000	12 Bulan	25.500.000	12 Bulan	25.500.000	12 Bulan	25.500.000	BPKPAD	Kab. Tmg

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.03.2.03.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat, Terwujudnya tertib pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi simbada, Terlaksananya pembinaan pengurus/pembantu pengurus barang, Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	989.180.400	12 Bulan	1.099.648.000	12 Bulan	1.105.723.740	12 Bulan	1.111.829.859	12 Bulan	1.111.829.859	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.03.2.03.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah berupa Tanah selain eks bengkok dan/atau gedung serta pinjam pakai, pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				PAD dari sewa tanah eks bengkok											
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		645.625.400		710.187.000		713.737.935		717.306.625		717.306.625		
		5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		645.625.400		710.187.000		713.737.935		717.306.625		717.306.625		
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	326.718.200	12 Bulan	375.000.000	12 Bulan	376.500.000	12 Bulan	377.000.000	12 Bulan	377.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	Terlaksananya penerbitan SKPD, penerbitan SPPT, dan pemutakhiran objek dan subjek pajak daerah	257.180.400	12 Bulan	258.000.000	12 Bulan	259.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	260.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	16.000.000	12 Bulan	23.093.000	12 Bulan	23.465.000	12 Bulan	25.180.000	12 Bulan	25.180.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	45.726.800	12 Bulan	54.094.000	12 Bulan	54.772.935	12 Bulan	55.126.625	12 Bulan	55.126.625	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.2.2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		399.696.846.807		476.515.099.007		478.710.498.752		480.906.504.996		480.906.504.996		
		5.2.2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan		389.199.042.807		464.967.514.607		467.162.914.352		469.358.920.596		469.358.920.596	BPKPAD	Kab. Tmg

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		2.500.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000	BPKPAD	Kab. Tmg
		5.2.2.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		7.997.804.000		8.797.584.400		8.797.584.400		8.797.584.400		8.797.584.400	BPKPAD	Kab. Tmg

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, indikator kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung tertuang dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7. 1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab Temanggung 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	16,69	15	15,50	15,75	16	16

Indikator Kinerja Program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung tertuang dalam tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7. 2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD BPKPAD Kab Temanggung 2024-2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program				Kondisi Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100	89,96	91	93	95	95
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	42,86	100	100	100	100	100
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	%	0	100	100	100	100	100
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	0	0	100	100	100	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	0	0	100	100	100	100
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	84,55	99,1	80	80	85	85
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	20,84	17,79	8	9	10	10
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	0	0	95	95,5	96	96

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program				Kondisi Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	%	0	0	100	100	100	100

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tingkat Kabupaten Temanggung.

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dengan pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya dimasukkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu BPKPAD sebagaimana dalam tabel VII.3 dibawah ini :

Tabel 7. 3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021	2024	2025	2026	
1.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	11.20	10.00	10.00	10.00	10.00
		Jumlah APBD						
2.	Rasio PAD	Jumlah PAD (Realisasi)	%	1.68	1.5	1.5	1.5	1.5
		Jumlah PDRB Non Migas						
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	rasio	60.68	45.00	45.00	45.00	45.00
		Jumlah Belanja APBD						
4.	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Jml WTP	10	10	10	10	10
5.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	-1	%	8.54	-10	-10	-10
		Total belanja APBD dikurangi satu						
6.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	-1	%	33.62	0	0	0
		Dibagi total belanja PAD dalam APBD dikurangi satu						

No	Indikator sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021	2024	2025	2026	
7.	Manajemen Aset	Jumlah Asset Management:	angka	4	4	4	4	4
		1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)						
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)						
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)						
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);						
8.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	%	13.75	12	11	10	10
		Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya						
9.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	%	90.53	90.00	90.00	90.00	90.00
		Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda						

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan transisi berisi tentang arah dan langkah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu dari Tahun 2024 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki, dan kelemahan dan hambatan yang dihadapi untuk meraih apa yang akan diinginkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang, yang diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) merupakan landasan dan pedoman dalam penyusunan Renja dan sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas, fungsi dan peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, selain perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, dengan 2 (dua) indikator utama yaitu : Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah. Sedangkan Indikator Kinerja BPKPAD ada 11 (sebelas) indikator dengan 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan


atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian satu dari tiga tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 yaitu **"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN"**.

Temanggung, 25 Januari 2023

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG


TRI WINARNO, SE, MM ca.
Pembina Tk. I
NIP. 197310201999031005

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN
PENYUSUNAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Senin tanggal enam belas Januari 2023 telah diselenggarakan forum rancangan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 -2026

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Auli BPKPAD Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026 yang disertai dengan target dan indikasi anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten

Temanggung Tahun 2024 -2026.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 16 Januari 2023
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku Pimpinan Sidang Forum
BPKPAD


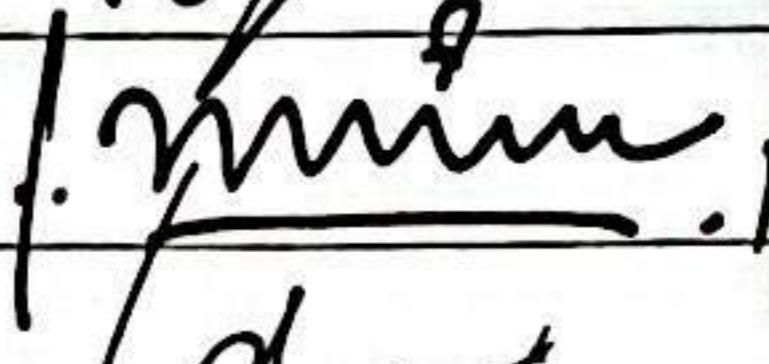
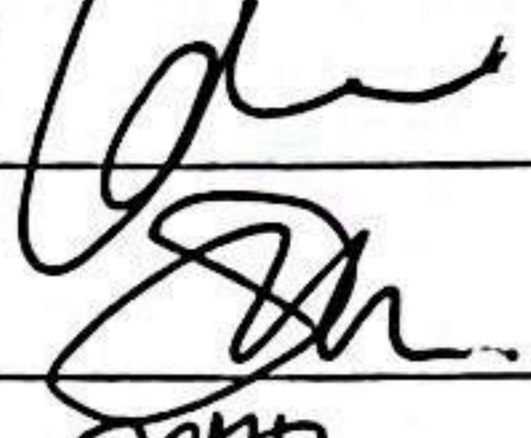




TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

Penyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung (Tahun 2024 -2026)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	TRI WINARNO, S.E., M.M.	Kepala BPKPAD Temanggung	
2	HUSEIN TSANI UBADILLAH, S.E., M.Si.	Sekretaris BPKPAD Temanggung	
3	Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	
4	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Penganggaran	
5	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
6	YUSI SUSANTI, SIP, MM	Kepala Bidang	

		Perbendaharaan	
7	KARTIKA SARI, ST, M.Eng	Kepala Bidang Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan	
8	FERRY WISNU CAHYO B, SE MM	Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian	
9	QOIDATUN, NS	Perencanaan	
10	NELY NIAMAH HANI, S.Sos,MM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
11	RAHMA ASITTA ZATIN, A.Md.Ak.	Pengelola Program dan Laporan	

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RANCANGAN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN BPKPAD
TAHUN PERENCANAAN 2024-2026

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	REKAMAN			428.730.393.612	146.439.077.513	146.336.177.190	533.092.929.500	513.092.929.500
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.718.091.306	25.834.793.306	25.961.967.273	26.091.787.109	26.091.787.109
	Administrasi Keselamatan Perangkat Daerah			24.682.891.306	24.812.793.306	24.853.467.273	24.888.287.109	24.888.287.109
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, tunjangan dan insentif unt ASN	bulan	24.682.391.306	24.812.793.306	24.812.793.306	24.888.287.109	24.888.287.109
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.200.000	0	0	0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya CCTV untuk kantor	Bulan	9.200.000	0			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			186.500.000	190.000.000	204.000.000	217.500.000	217.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Bulan	10.000.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	Bulan	35.000.000	35.000.000	37.500.000	40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	13.500.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000
	Facilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bulan	79.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	59.000.000	50.000.000	53.500.000	57.500.000	57.500.000
	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	622.000.000	622.000.000	694.500.000	752.500.000	752.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Bulan	230.000.000	230.000.000	253.000.000	278.000.000	278.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, cleaning dan adm , jasa sampah dan lembur	orang	360.000.000	390.000.000	420.000.000	472.000.000	472.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pereliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.900.000	210.900.000	222.000.000	235.500.000	235.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pengkayaran STNK	Bulan	85.000.000	85.000.000	99.500.000	97.000.000	97.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	50.000.000	50.000.000	52.500.000	55.000.000	55.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya perleengkapan kantor dan penggantian suku cadang komputer dan AC	Bulan	25.000.000	25.000.000	26.500.000	28.500.000	28.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	Bulan	50.000.000	50.000.000	52.500.000	55.000.000	55.000.000	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			401.275.996.501	476.258.949.007	480.651.248.752	483.054.504.996	483.054.504.996	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				500.876.000	554.350.000	644.250.000	707.500.000	707.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA & PPAS APBD Kabupaten Temanggung	Dok	52.345.000	57.000.000	65.000.000	71.500.000	71.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Temanggung	Dok	37.805.000	41.750.000	75.750.000	83.500.000	83.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung & Perbup tentang Penjabaran APBD	Dok	210.726.000	235.000.000	258.500.000	285.000.000	285.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung & Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dok	300.000.000	320.000.000	245.000.000	267.500.000	267.500.000	

No	Uraian/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir	
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Koordinasi dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah					467.180.400	515.000.000	566.500.000	625.000.000	625.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan penelitan kebijakan dibidang SPP dan SPM, Pemberian Pembatasan Rincian Penganaan Atas Pengeluaran SP1 Gaji dan non gaji serta pemeritikan SPPP & terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta penugutan dan pemotongan apid dengan instansi terkait	Perangkat Daerah	467.180.400	515.000.000	566.500.000	625.000.000	625.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					611.092.500	675.500.000	730.000.000	815.500.000	815.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terwujudnya Buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung	buku	210.616.500	235.000.000	245.000.000	280.500.000	280.500.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Perangkat Daerah	400.476.000	440.500.000	485.000.000	535.000.000	535.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH			1.104.680.400	1.215.148.000	1.221.223.740	1.227.329.859	1.227.329.859	
	Pengelolaan Barang Milk Daerah			1.104.680.400	1.215.148.000	1.221.223.740	1.227.329.859	1.227.329.859	
	Penyesuaian Standar Harga	Terwujudnya Standar Harga Satuan		25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	
	Penatausahaan Barang Milk Daerah	Terwujudnya tanah tenda yang bersertifikat, Terwujudnya tertib pengelolaan dan penatausahaan barang milk daerah, Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sribada, Terlaksananya pembinaan pengurus/pembantu pengurus barang, terselesainya laporan barang milk daerah tepat waktu	bulan	989.180.400	1.099.648.000	1.105.723.740	1.111.829.859	1.111.829.859	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah berupa Tanah selain eks bengkok dan/atau gedung serta pinjam pakal, pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	bulan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				645.625.400	710.187.000	713.737.935	717.306.625	717.306.625
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				645.625.400	710.187.000	713.737.935	717.306.625	717.306.625
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	bulan	326.718.200	375.000.000	376.500.000	377.000.000	377.000.000
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	Terlaksananya penerbitan SKPD, penerbitan SPPT, dan pemutakhiran objek dan subjek pajak daerah	bulan	257.180.400	258.000.000	259.000.000	260.000.000	260.000.000
	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	bulan	16.000.000	23.093.000	23.465.000	25.180.000	25.180.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	bulan	45.726.800	54.094.000	54.772.935	55.126.625	55.126.625
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				399.696.846.807	476.515.099.007	478.710.498.752	480.906.504.996	480.906.504.996
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan			389.199.042.807	464.967.514.607	467.162.914.352	469.358.920.596	469.358.920.596
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			2.500.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			7.997.804.000	8.797.584.400	8.797.584.400	8.797.584.400	8.797.584.400